



H. Mahyeldi, S.P.

Jenis Kelamin: Laki-laki

Alamat: KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

Tempat, Tanggal Lahir: Bukittinggi, 25 Desember 1966

Pendidikan Terakhir: S1

Agama: Islam

Pekerjaan:

Gubernur Sumatera Barat (masa bakti Februari 2021 s/d 2024)

Status Hukum:

Tidak memiliki status hukum

Riwayat Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Institusi pendidikan	Gelar	Tahun masuk	Tahun keluar
1	S1	Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia	S.P.	1986	1995
2	SMA	SMAN 1 Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia	-	1983	1986
3	SMP	SMPN Gadut Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia	-	1980	1983
4	SD	SDN 9 Dumai, Riau, Indonesia	-	1974	1980

Riwayat Kursus/Diklat

No	Nama kursus dan diklat	Lembaga penyelenggara	Tahun masuk	Tahun keluar
1	Orientasi Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan ke-1 Tahun 2015	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	2015	2015

Riwayat Organisasi

No	Nama organisasi	Jabatan	Tahun masuk	Tahun keluar
1	OSIS SMPN GADUT	PENGURUS	1981	1983
2	ROHIS SMAN 1 BUKITTINGGI	PENGURUS	1985	1985
3	BEM FAKULTAS PERTANIAN UNAND	PENGURUS	1990	1990
4	IIRO (International Islamic Relief Organization)	PENGURUS	2004	2004
5	WAMY (World Assembly Moslem Youth)	ANGGOTA	2004	2004
6	BKSPPI (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Sumatera Barat)	SEKRETARIS	2005	2005
7	DPW PK Sumbar	Wakil Ketua	1999	2000
8	DPW PK Sumbar	Ketua	2000	2002
9	DPW PKS Sumbar	Ketua	2002	2005
10	DPW PKS Sumbar	Ketua	2020	2025
11	MPW PKS Sumbar	Ketua	2015	2020
12	Ketua Karate INKANAS Kota Padang	Ketua	2008	2008
13	KPAI Kota Padang	Ketua	2009	2009
14	BNK Padang	Ketua	2009	2014
15	PSP Padang	Ketua	2009	2019
16	ICMI Orda Padang	Ketua	2010	2024
17	PMI Kota Padang	Ketua	2013	2024
18	Masyarakat Ekonomi Syaria'h (MES) Sumbar	Ketua Umum	2018	2022
19	Forum Bela Negara Sumbar	Ketua Umum	2018	2023

Riwayat Tanda Penghargaan

No	Nama penghargaan	Lembaga pemberi penghargaan	Tahun
1	Tokoh Penggerak Koperasi Utama	DEWAN KOPERASI INDONESIA	2022
2	PIAGA, LENCANA SATYA UTAMA INOVASI DESA	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	2023
3	PIAGAM PENGHARGAAN DUKUNGAN DAN KERJA YANG LUAR BIASA UNTUK PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	2023
4	Piagam Penghargaan atas Jasa Dan Dedikasinya Dalam Pembangunan Kota Padang Bidang Keagamaan	PEMERINTAH KOTA PADANG	2024
5	Piagam Penghargaan atas Kemitraan dan Kerjasama yang Baik dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	2022
6	Membina dan Membangun Sebagian Besar atau Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA	2023
7	Kotribusi dalam Mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Melampirkan Surat Selesai Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam Setiap Pengajuan Permohonan Fasilitasi Produk Hukut Daerah kepada Gubernur	MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA	2023

Riwayat Publikasi

No	Judul	Penerbit	Tahun terbit
Data tidak ada			

Close

Jenis

Gub

C

H. Ma

Visi

Sumat

Berke

Sumb

maju.

norma

Agama

syarak

mang

yang

islami

bersik

goton

Masya

kompr

kebaik

menss

meng

kepad

bahu

dan m

penya

minun

porno

krimi

meng

men

MAJU

provin

holist

nasior

berins

kebut

berke

yang

dalam

aspek

ada k

profes

kewila

sektor

sisi

profes

segme

sosial

rohan

Misi

1.

manu

saing

berka

Menin

meng

sektor

Sumb

nasior

meng

blue ekonomi.

3. Meningkatkan usaha

perdagangan

dan industri

kecil/menengah

serta ekonomi

berbasis digital.

4. Melakukan

akselerasi pembangunan

infrastruktur

yang berkeadilan,

berwawasan

lingkungan,

serta meningkatkan

ketahanan dan tanggap bencana.

5. Meningkatkan tata

kehidupan yang

harmonis, agamis, beradat dan

berbudaya berdasarkan falsafah

"adat basandi syarak, syarak basandi

kitabullah.

6. Meningkatkan daya saing

kepariwisataan dan akselerasi

pertumbuhan ekonomi kreatif

terutama kepada pelaku UMKM.

7. Mewujudkan tata

kelola pemerintahan

propinsi dan pelayanan publik yang